



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Oktober 2016

Halaman: 19

Pencairan Bantuan Semakin Mudah

JOGJA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin pencairan dana program bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akan semakin mudah dilakukan para siswa.

Kemendikbud menuliskan KIP Plus di wilayah Jogja.

KIP Plus tak hanya sebagai bukti penerima bantuan, namun juga sebagai alat pembayaran bagi peserta Program Indonesia Pintar

50 persen sisanya dapat ditcairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi," ujar Hamid saat menyerahkan KIP Plus di SMA Negeri 9 Jogja, Rabu (19/10).

Siswa pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah. Namun koperasi tersebut harus memiliki fasilitas mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Mereka juga bisa mencairkan bantuan lewat mesin ATM. Hanya saja dana yang ditarik tidak bisa dikuras sekaligus.

KIP Plus merupakan pengembangan penyaluran bantuan pendidikan yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kemendikbud mengenai Peningkatan Edukasi Kebanksentralan, Perluasan Akses Keuangan, dan Elektrifikasi Penyaluran.

Sebagai tahap awal, Kemendikbud telah menyerahkan 1.295 KIP Plus kepada sebagian siswa penerima PIP di Kota Jogja. Dengan rincian untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 629 kartu, siswa SMA sebanyak 142, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 524 kartu. Lebih kurang 150 mesin EDC telah untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Kota Jogja. Masa uji coba KIP Plus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Adapun besaran dana bantuan penerima PIP berkisar antara Rp500.000-Rp1 juta. Hamid menjelaskan, jumlah siswa DIV penerima PIP ada 13.977. Dari jumlah itu KIP sudah terdistribusi kepada 13.150 siswa.

Ke depan para siswa penerima PIP bisa dengan mudah mencairkan dana bantuan pendidikan PIP tidak hanya bertujuan untuk memudahkan penanganan namun juga mendorong perbaikan tata kelola keuangan dana pendidikan yang lebih baik. Ke depan, Kemendikbud juga akan mengembangkan transaksi non tunai untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini diharapkan dapat mewujudkan program bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.

Adapun pemilihan Jogja menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai didasarkan pada ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai. Selama masa uji coba, tim gabungan yang terdiri dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Bank Indonesia, BRI dan BNI akan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dan kebijakan.

Instansi

1. Dinas Pendidikan
2. Positif
3. Biasa
4. Untuk Diketahui
- 5.

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005